

1BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti mengenai Implementasi Penetapan Istitha'ah Kesehatan Jemaah Haji oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi penetapan istitha'ah kesehatan jemaah haji di Kota Banjarbaru telah dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan tahapan fungsi manajemen George R. Terry (POAC). Perencanaan (planning) dilakukan melalui penyusunan jadwal pemeriksaan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana, serta koordinasi dengan instansi terkait. Pengorganisasian (*organizing*) dilaksanakan melalui pembagian tugas tenaga kesehatan dan penetapan alur pelayanan pemeriksaan. Pelaksanaan (*actuating*) dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan tahap I dan tahap II hingga penetapan status istitha'ah kesehatan jemaah. Selanjutnya, pengawasan (*controlling*) dilakukan melalui evaluasi internal dan lintas sektor guna memastikan proses penetapan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
2. Dalam pelaksanaannya, penetapan istitha'ah kesehatan masih menghadapi beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pemeriksaan di beberapa puskesmas, rendahnya pemahaman sebagian jemaah terhadap urgensi istitha'ah kesehatan, koordinasi lintas sektor yang belum

sepenuhnya optimal, serta tantangan teknis dalam penggunaan sistem informasi kesehatan jemaah (Siskohatkes). Kendala-kendala ini menunjukkan perlunya penguatan manajemen pelayanan kesehatan haji agar lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, disarankan untuk memperkuat perencanaan program istitha'ah kesehatan dengan menyiapkan data estimasi jumlah jemaah lebih dini serta meningkatkan koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Kementerian Agama, rumah sakit rujukan, dan puskesmas. Selain itu, Dinas Kesehatan perlu meningkatkan kompetensi serta jumlah tenaga kesehatan yang terlibat, terutama dalam menangani jemaah lansia dan risiko tinggi. Penyediaan alat pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan kognitif dan fasilitas kesehatan tertentu juga perlu dilengkapi agar proses penetapan istitha'ah berjalan lebih optimal.
2. Bagi Kementerian Agama Kota Banjarbaru, disarankan untuk mempercepat penyampaian data jemaah haji kepada Dinas Kesehatan agar pembinaan kesehatan dapat dilakukan sejak masa tunggu secara lebih terstruktur. Kemenag juga diharapkan lebih aktif dalam mendukung sosialisasi pentingnya istitha'ah kesehatan kepada seluruh calon jemaah.
3. Bagi Jemaah Haji, diharapkan agar lebih mempersiapkan kondisi kesehatan sejak jauh hari sebelum keberangkatan dengan rutin melakukan

pemeriksaan kesehatan, menjaga pola hidup sehat, serta mengikuti arahan pembinaan dari petugas kesehatan. Hal ini penting agar jemaah dapat mencapai kondisi istitha'ah secara fisik maupun mental demi kelancaran ibadah di Tanah Suci.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau dengan pendekatan kuantitatif agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi penetapan istitha'ah kesehatan di berbagai daerah.